PENOLAKAN *ITHBAT* NIKAH SIRI BAGI SUAMI YANG SUDAH BERISTRI

Mohammad Roqib

Dusun Takotta Desa Gunilap Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan. E-mail: roqibmuh@gmail.com

Abstract: *This study reviews the judge's legal consideration basis in rejecting the confirmation of unregistered marriage (isbat nikah) for a husband who had married in the Religion Court's decision of Nganjuk No: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj and how the analysis of Islamic law against the denial of the confirmation of unregistered marriage for a husband who had married in the Religious Court's decision of Nganjuk. The data of the research are obtained through documentation and interview. The data are then analyzed by descriptive-deductive mindset. This study concludes that the consideration and the legal basis used by the judge in the case of the confirmation of unregistered marriage is Article 4, paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 About Marriage jo. Article 52 paragraph 1 Islamic Law Compilation. In Article 5, paragraph 1 (a) of Law No. 1 of 1974 jo. Article 58, paragraph 1 (a) Islamic Law Compilation states that one of the requirements of conducting polygamy is the condition must be approved by wife. The judge rejected the request of the confirmation of unregistered marriage because in this case, according to the judge, is classified as polygamy. Judge just looks at the judicial aspect without considering the principles of maqasid al-shari'ah. In this case, the very important to note is the civil right and welfare of children which is one of the main constituents of hijzd al-nasl (protection of children) that should be maintained. In consideration of hijzd al-nasl, the petition of the confirmation of unregistered marriage should have been granted.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak *ithbat* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan *ithbat* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara *ithbat* nikah adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Hakim menolak permohonan *ithbat* nikah karena pada kasus ini menurut majelis hakim

tergolong perkara poligami. Hakim hanya melihat dari aspek yuridis tanpa mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah*. Dalam kasus ini yang sangat penting untuk diperhatikan adalah hak-hak keperdataan dan kesejahteraan anak yang merupakan salah satu unsur pokok *hifzu al-nasli* yang harus terpelihara. Dengan pertimbangan tersebut permohonan *ithbat* nikah ini seharusnya dikabulkan.

Kata Kunci: *ithbat nikah* dan *nikah sirri*

Pendahuluan

Pencatatan perkawinan tidak mendapatkan perhatian khusus dalam kitab-kitab fiqh, meskipun ada ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *mu'amalah*. Namun, pencatatan perkawinan menjadi salah satu wujud pembaharuan dalam hukum keluarga Islam yang diantaranya memuat aturan pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.¹

Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan, dikenal dengan nikah siri. Nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari perkawinannya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dianggap sah oleh hukum dan hak keperdataannya berhubungan dengan ibunya. Dengan artian anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.²

Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri dan poligami bawah tangan. Mereka hendak mencatatkan pernikahannya ketika punya kepentingan dengan cara mengajukan *ithbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta nikah. Hal ini dikarenakan ada ketentuan yang menyatakan yaitu pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ithbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".³

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 119.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 284.

³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) .

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang telah diamendemen dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu mengenai *ithbat* nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Ketentuan *ithbat* nikah sangat diperlukan bagi seluruh warga negara yang perkawinannya tidak dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Jika pernikahan tidak tercatat tidak ada penyelesaian, maka akan menimbulkan akibat hukum baik pada kedua pasangan suami istri itu sendiri lebih-lebih kepada anak-anak mereka.

Dari gambaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj. tentang permohonan *ithbat* nikah siri terhadap suami yang sudah beristri. Dalam kasus tersebut, seorang perempuan mengajukan permohonan *ithbat* nikah terhadap termohon 1 yaitu laki-laki yang telah menikahinya sebagai istri kedua dengan cara nikah tanpa dicatat oleh petugas KUA atau nikah siri serta sudah dikaruniai seorang anak dari pernikahannya tersebut, sedangkan suaminya itu sudah mempunyai ikatan pernikahan dengan perempuan lain (poligami), yaitu termohon 2 (isteri pertama). Namun hasil putusan majelis hakim menolak permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh pemohon. Dari kasus penolakan *ithbat* nikah tersebut, penulis bermaksud mengkaji dasar pertimbangan penolakan hakim terhadap *ithbat* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj. dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan *ithbat* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Metode Penelitian

Sumber Data primer penelitian ini adalah dokumen Pengadilan Agama Nganjuk yang berupa putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. tentang permohonan *ithbat* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dan Para hakim yang memutuskan perkara dalam putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan sumber data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,⁴ adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil putusan perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim dan beberapa buku yang berkaitan dengan putusan ini.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Data-data primer dikumpulkan dari dokumen putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. tentang permohonan *ithbat* nikah sirri bagi suami yang sudah beristri dan catatan-catatan yang lain di Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan wawancara adalah percakapan dengangan maksud tertentu, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara dengan pengajuan beberapa pertanyaan kepada pihak terwawancara.⁵ Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan panitera dan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

Setelah semua data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data yang berkaitan dengan putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. tentang permohonan *ithbat* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan situasi atau kejadian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis faktual dan akurat.⁶ Selanjutnya data diolah dengan menggunakan penalaran deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini yang dimaksud ialah pengetahuan umum

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ke 32, 2014), 186.

⁶ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

mengenai kasus *ithbat* nikah kemudian ditarik kedalam masalah penolakan permohonan *ithbat* nikah siri terhadap suami yang telah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

Pengertian *Ithbat* Nikah

Ithbat nikah merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*ithbat*" dan "nikah". Kata *ithbat* merupakan masdar dari kata *athbbata*, *yuthbit*, *ithbatan* yang mempunyai arti penetapan.⁷ Sedangkan nikah secara bahasa adalah *الْوُطْءُ، الزَّم* yang artinya ialah bersenggama atau bercampur.⁸ sedangkan menurut istilah ialah suatu akad yang menyebabkan diperbolehkannya persetubuhan seorang lelaki dengan perempuan selama perempuan tersebut bukan perempuan yang diharamkan diikahi menurut syara'.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dfinisi tentang pernikahan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 2 ialah "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Sedangkan arti nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (1) ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari penjelasan di atas apabila dua kata *ithbat* dan nikah digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *ithbat* nikah ialah penetapan oleh Pengadilan Agama terhadap ikatan yang dapat memperbolehkan terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa *ithbat* nikah adalah penetapan oleh

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia)*, (yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) 145.

⁸ Djaman Nur, *fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, (Damisyq: Dar Fikr, 1998), 29.

Pengadilan Agama atas perkawinan yang sah tetapi tidak mempunyai akta nikah.¹⁰

Dengan demikian, pada dasarnya *ithbat* nikah ialah penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat Islam yaitu telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pihak pemerintah yang berwenang yaitu, bagi orang yang beragama Islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama setempat.

Ithbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali ada kepentingan Undang-Undang menghendakinya.¹¹ Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. *Ithbat* nikah.
5. Penetapan wali adhal.

Dasar Hukum *Ithbat* Nikah

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, perkawinan tidaklah dianggap cukup hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya yang telah dirumuskan dalam fiqh saja. Namun dalam UU No. 1 Th.1974 di jelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

¹⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 339.

¹¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahannya mendapatkan akta nikah. Dalam hal ini yang berwenang mencatat perkawinan bagi orang Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah di kantor urusan agama. Sehingga apabila perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *ithbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kewenangan *ithbat* nikah bagi Pengadilan Agama pada awalnya adalah diperuntukkan untuk mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah tangan sebelum diberlakukannya UU No. 1 Th.1974 tentang perkawinan. Tetapi kewenangan tersebut berkembang di Pengadilan Agama.

Mengenai *ithbat* nikah Permenag No. 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) memberikan ketentuan bahwa jika KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Namun aturan ini hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang No. 1 Th. 1974 bukan perkawinan yang dilakukan sesudahnya Undang-Undang ini.

Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan yaitu pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama”. Dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *ithbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama ialah perkara yang berkenaan dengan hal sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Th. 1974.¹²

Dengan berdasarkan penjelasan diatas, maka kompilasi hukum islam (KHI) telah memberikan kewenangan terhadap

¹² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI), 137.

Pengadilan Agama dalam perkara *ithbat* nikah yang melebihi Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan yang kemudian dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu hal yang penting dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹³

Dalam kitab-kitab fiqh para ahli fiqh terdahulu tidak menjelaskan mengenai hukum pencatatan perkawinan atau akta nikah. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman maka pencatatan perkawinan ini harus diperhatikan dengan serius dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kaidah fiqh :“suatu tindakan pemerintah bertitik terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat”.¹⁴

Pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁵ Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyatakan: “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”.

Pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI ialah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi warga masyarakat yang beragama Islam. Ketentuan tersebut diatas merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi keharusan mencatat pernikahan tersebut bukan berarti pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 407.

¹⁴ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014), 147.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Idonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), 30.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.¹⁶

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif saja. Akan tetapi ia mempunyai manfaat yang sangat begi kepentingan perkawinan, manfaat ini ialah:

1. Manfaat yang bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi terjadinya kekurangan atau penimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat menghindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat nikah.
2. Manfaat akta nikah yang bersifat refresif, yaitu bagi suami istri yang karena suatu perkawinannya tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan *ithbat* nikah ke Pengadilan Agama, pencatatan inilah selanjutnya disebut dengan tindakan refresif dengan maksud agar masyarakat melangsungkan perkawinannya tidak hanya mementingkan aspek hukum fiqh saja tetapi jga menganggap penting aspek keperdataannya.¹⁷

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang di atur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangganya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Keren dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁸

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulus di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 113.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 117.

¹⁸Ibid, 107.

Karenanya agar setiap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah bisa mempunyai kekuatan hukum, hendaknya *ithbat* nikah tidak dibatasi alasan-alasan tertentu saja, akan tetapi diberi peluang seluas mungkin bagi para pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu suami, istri, anak-anaknya dan setiap orang yang mempunyai hubungan darah, terutama dalam tujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris atau dalam masalah melaksanakan tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris dalam masa hidupnya. Begitu juga hendaknya permohonan *ithbat* nikah bisa dilakukan oleh istri yang lain bagi seorang yang melakukan poligami, guna mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁹

Akibat Hukum dari *Ithbat* Nikah

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara legal kedua mempelai akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

Lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengesahan secara hukum untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membawa konsekuensi dan akibat hukum, yaitu:

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah,

¹⁹ Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 374.

maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Timbulnya hubungan hukum yang pasti antara orang tua dan anak mengakibatkan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya, baik menyangkut biaya hidup, pendidikan, kesehatan, maupun terhadap perlindungan keamanan dalam pengasuhannya. Dalam pandangan hukum bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Deskripsi Putusan No. 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Ithbat Nikah Siri Bagi Suami yang Sudah Beristri

Pada tanggal 24 Juli 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan yang kemudian didaftarkan dalam register perkara Nomor : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj yang berisi tentang permohonan *ithbat* nikah. Awal perkara ini bermula dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa atau Guru TK, tempat tinggal Dusun Besuki RT 03 RW 12 Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, dengan Termohon I, Agama Islam, pekerjaan advokat, tempat tinggal Bluru Permai Blok FH No 24 kabupaten Sidoarjo. Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam di Pondok Pesantren Darussalam Loceret. Adapun wali nikahnya ialah ayah kandung Pemohon yang selanjutnya diserahkan atau dikuasakan secara lisan kepada Gus Mimin pimpinan Pondok Pesantren Darussalam untuk menikahkan Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Sulistijo Nisita Wirjawan, S.H.

dan SAKSI. Dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dan dibayar tunai.

Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon masih gadis sedangkan Termohon I sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai istri yaitu Termohon II bernama Termohon II Binti XXXXX yang menikah pada tanggal 8 Pebruari 1999 Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/14/II/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Pernikahan Termohon I dengan Termohon II sudah lebih dari 14 tahun dan sampai sekarang belum dikarunia Anak.

Sebelum pernikahan Termohon I dan Pemohon dilangsungkan, Terhomon I terlebih dahulu meminta izin kepada Termohon II dengan surat persetujuan tanggal 23 September 2012 yang mana dalam surat tersebut Termohon II menyetujui dengan ikhlas dan ridho Termohon I menikah dengan Pemohon. Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon I hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang putri bernama XXXXX. Sampai dengan saat diajukannya permohonan, Pemohon dan Termohon masih hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Para Termohon yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan Sah perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2012 di Pondok Pesantren Darussalam Loceret Nganjuk.
- c. Mencatatkan perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Nganjuk.
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- e. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II hadir sendiri dalam

persidangan, dan selanjutnya majelis hakim manasehati Pemohon agar dirundingkan dengan Termohon I dan Termohon II dengan jalan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan Saudara Drs. H. Isnandar, MH, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk sebagai mediator. Akan tetapi, upaya mediasi telah gagal. Karena upaya perdamaian berhasil, selanjutnya ketua majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yaitu menyatakan ingin mendapat kepastian hukum untuk perkawinan dan anaknya.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada intinya Termohon I membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Berdasarkan jawaban tersebut, Termohon I memohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan jawaban Termohon I.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon I dengan Pemohon yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2012 di Pondok Pesantren Darussalam Loceret Nganjuk.
- c. Mencatatkan perkawinan antara Termohon I dengan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Nganjuk.
- d. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.
- e. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas dasar permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon II secara tegas menolak dan tidak memberikan izin atas permohonan *ithbat* tersebut. Termohon II beralasan, bahwa Pemohon telah melakukan hubungan di luar nikah dengan Termohon I padahal Pemohon tahu kalau Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dengan Termohon II. Dari hubungan tersebut Pemohon hamil. Sehingga apa yang ditulis pada gugatan Pemohon pada angka 3 yang menerangkan bahwa status Pemohon adalah masih gadis itu adalah pernyataan yang tidak benar.

Adapun Termohon II tidak menerima kalau Termohon I melakukan hubungan terlarang dengan Pemohon dikarenakan dalam perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang belum dikaruniai anak, masih ada jalan lain untuk memperoleh anak yang belum dilakukan oleh Termohon I. Misalnya usaha bersama periksa ke dokter, mengupayakan bayi tabung dan lain sebagainya.

Dikarenakan Termohon I menyatakan kalau Pemohon telah hamil sebelum nikah, serta Termohon I telah menyiapkan surat persetujuan nikah secara tertulis untuk ditanda tangani oleh Termohon II, maka Termohon II memberikan tanda tangan diatas surat persetujuan itu dengan pertimbangan menjaga nama baik suami (Termohon I) untuk menanggung malu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang disebabkan perselingkuhan antara Pemohon dengan Termohon I, dan dari hubungan tersebut Pemohon telah melahirkan seorang anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon II.
- b. Tidak mengabulkan permohonan *Ithbat* Nikah dari Pemohon.

Atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut :

- a. Menolak jawaban para Termohon kecuali diakui kebenarannya secara tegas.
- b. Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan Perubahan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk.

Atas Replik yang disampaikan Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan Duplik. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3518174906910001, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor: 3518172806670001, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASRI Nomor: 3518174207690001, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor: 12.17.18.2002.04402, tanggal 23 Oktober 2002, yang dikeluarkan Camat Gondang Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.4).
5. Fotokopi Keterangan lahir No Reg..... tanggal 8 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglingsgo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.5).

Selain bukti-bukti tertulis sebagaimana di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan.

Adapun permohonan *Ithbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk keperluan agar status pernikahan Pemohon dan Termohon I diakui oleh Hukum Negara. Namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon I menikahi Pemohon secara siri. Selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercerai.

Termohon I juga menyampaikan bukti-bukti secara tertulis yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor: 474/14/II/1999, tanggal 8 Pebruari 1999, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Surabaya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I, SH. M. Hum. Nomor: 3515082901094217, tanggal 04 Oktober 2013, yang

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, SH. M. Hum. Nomor: 3515082106700010, tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.3).
4. Fotokopi surat persetujuan yang dibuat oleh saudari Termohon II, A.Md., tanggal 23 September 2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.4).
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara XXXXXX tanggal 15 Agustus 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.5).

Dalam hal ini Termohon I tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Termohon II juga menyampaikan bukti-bukti secara tertulis yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor: 474/14/II/1999, tanggal 8 Pebruari 1999, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Surabaya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.II.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I, SH. M. Hum. Nomor: 3515082901094217, tanggal 04 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Sidoarjo, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.II.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, A.Md. Nomor: 3515086505750001, tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.II.3).

Dalam hal ini Termohon II juga tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Pada dua kali sidang berikutnya Termohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon II telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor : 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj. tanggal 07 Juli 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum.

Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Juni 2014, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya mohon untuk majelis hakim segera memutuskan perkara ini.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PA Nganjuk.

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada ketiga belah pihak dan pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi, majelis hakim memberikan pertimbangannya dalam permohonan Pemohon yang secara ringkas menyatakan bahwa, majelis hakim telah memanggil Pemohon, Termohon I, dan Termohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 390 HIR ayat (1).

Secara litigasi setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar para pihak dalam permohonan *ithbat* nikah untuk berfikir ulang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi kehendak pasal 130 ayat (1) HIR serta amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah pula mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon

melalui proses mediasi dengan menunjuk Saudara Drs. H. Isnandar M.H. sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 04 Desember 2013.

Oleh karena perkawinan yang dimohon untuk *diitsbatkan* adalah perkawinan Pemohon sebagai isteri kedua dari Termohon I maka harus diperiksa dan diputus dengan acara Contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di sidang Pengadilan Agama.

Oleh karena Pemohon tetap bersikukuh untuk *mengithbat* nikahkan perkawinannya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Termohon I dalam jawabannya tidak menyangkal terhadap seluruh permohonan Pemohon dan bahkan mendukung serta menyetujui dengan mendasarkan beberapa pendapat para pakar hukum sebagaimana yang diteguhkan dalam jawaban Termohon I. Sedangkan Termohon II menyangkal dan tidak menyetujui terhadap permohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam dengan Termohon I namun tidak tercatat pada PPN/ Kantor Urusan Agama secara resmi. Untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon II pada tanggal 18 Oktober 2012, di Pondok Pesantren Darussalam, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama SAKSI

yang diwakilkan kepada Gus Minin pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI; dengan maskawin Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam akan tetapi tidak dicatatkan di PPN/ Kantor Urusan Agama setempat

2. Sewaktu dilaksanakan perkawinan Pemohon mengetahui Termohon I sudah mempunyai isteri bernama TERMOHON II Binti XXXXX yang menikah dengan Termohon I pada tanggal 8 Pebruari 1999.
3. Perkawinan Pemohon dengan Termohon I, menjadikan Pemohon sebagai istri kedua Termohon I.
4. Perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 sebagaimana bukti P.5
5. Termohon II menolak dengan tegas adanya *ithbat* nikah atau poligami antara Pemohon dengan Termohon I yang diajukan Pemohon walaupun Termohon II telah mengizinkan kepada Termohon I untuk menikahi Pemohon namun izin tersebut hanya untuk menikah secara siri bukan untuk pengajuan *ithbat* nikah atau izin poligami karena untuk menutup aib keluarga sebab Pemohon telah hamil dan Termohon II tidak setuju atau tidak bersedia dimadu.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara formil permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk harus dinyatakan dapat diterima. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon dan Termohon I yaitu agama Islam.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan yaitu: adanya mahar. Jika dihubungkan dengan fakta pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, dan harus dinyatakan pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam.

Pemohon mengajukan *ithbat* nikah antara dirinya dengan Termohon I yang merupakan perkawinan Poligami. Menurut prosedur perundangan harus menempuh jalur yaitu wajib mendapat izin dari Pengadilan, hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat I huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari istri. Jika dihubungkan dalam fakta persidangan Istri Pertama Termohon I yaitu Termohon II dengan tegas menolak atau tidak setuju adanya *itsbat* nikah atau poligami antara Pemohon dengan Termohon I.

Sebagaimana pernyataan Termohon II di depan sidang Pengadilan Agama, di samping menolak adanya *ithbat* nikah atau poligami antara Pemohon dengan Termohon I, juga menjelaskan bahwa izin yang diberikan Termohon II kepada Termohon I hanya untuk menikah siri bukan izin untuk melakukan *ithbat* nikah atau poligami dengan alasan izin tersebut diberikan untuk menutup aib karena sebelum pelaksanaan nikah Pemohon telah hamil sebagaimana pengakuan Termohon I kepada Termohon II sebelum menandatangani surat izin untuk kawin siri.

Surat izin yang ditandatangani oleh Termohon II, sebagaimana bukti T.I-4. berupa fotokopi surat persetujuan untuk memberi izin kepada Termohon I untuk menikahi Pemohon tertanggal 23 September 2012 adalah sangat berdekatan dengan terjadinya perkawinan siri antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam rentang waktu yang cukup lama dengan permohonan Pemohon mengajukan *ithbat* nikah tertanggal 24 Juli 2013. Hal ini

menunjukkan apa yang dinyatakan Termohon II bahwa izin yang diberikan oleh Termohon II kepada Termohon I untuk menikah dengan Pemohon adalah secara siri karena untuk menutup aib keluarga sebab Pemohon telah hamil adalah benar, untuk itu harus dinyatakan bahwa Termohon II tidak memberi izin kepada Termohon I untuk berpoligami dengan Pemohon dengan cara meng*ithbatkan* nikah yang diajukan oleh Pemohon oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Termohon II tidak memberi izin adanya *ithbat* nikah atau poligami yang diajukan Pemohon. Permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah termasuk *ithbat* nikah poligami, maka harus diperlakukan dan diterapkan juga ketentuan hukum tentang poligami, yaitu adanya izin poligami dari Pengadilan.

Persyaratan poligami berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah harus ada izin Pengadilan dan dalam pengajuan *ithbat* nikah yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menyertakan bukti telah mendapat izin dari Pengadilan. Karena ternyata faktanya permohonan *ithbat* nikah yang diajukan Pemohon tanpa disertai ijin dari Pengadilan untuk melakukan poligami, dan poligami harus ada izin dari istri maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut ditolak.²⁰

Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Nganjuk dalam Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Majelis hakim Nganjuk memberikan putusan menetapkan untuk menolak permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh pemohon. Majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-

²⁰ Muh. Mahfudz dan Yomi kurniawan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 5 Juli 2015.

alasan hukum untuk menolak permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh pemohon.

Adapun pertimbangan majelis hakim menolak permohonan *ithbat* nikah dalam permohonan ini adalah bahwasannya pengajuan *ithbat* nikah antara pemohon dengan termohon I termasuk perkawinan poligami yang menurut prosedur perundang-undangan harus menempuh jalur yang ditentukan yaitu wajib mendapat izin dari pengadilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Jika dihubungkan dengan fakta persidangan istri pertama, yaitu termohon II dengan tegas menolak atau tidak setuju terhadap *ithbat* nikah yang diajukan oleh pemohon atau adanya poligami antara pemohon dengan termohon I.

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan hukum formil dan materiil saja, akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim mempunyai keyakinan yang kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum. Menurut pandangan hakim, seharusnya permohonan dalam perkara ini adalah permohonan izin poligami bukan permohonan *ithbat* nikah dan jika permohonan *ithbat* nikah ini dikabulkan maka mengakibatkan seorang dengan mudah dan menganggap gampang melakukan nikah siri kemudian mengajukan *ithbat* nikah ke Pengadilan Agama.²¹

Apabila melihat alasan-alasan hakim dalam putusan tersebut, majelis hakim telah memenuhi aturan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan juga pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh izin poligami harus

²¹ Muh. Mahfudz dan Yomi kurniawan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 5 Juli 2015.

ada persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Akan tetapi, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan dasar yang digunakan oleh hakim, karena dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Apabila majelis hakim berpandangan, bahwa yang seharusnya diajukan dalam perkara ini adalah permohonan poligami, maka setelah mendapat izin poligami dari pengadilan, pemohon dan termohon I harus melangsungkan pernikahan ulang yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan sebelumnya pemohon dan termohon I telah melangsungkan pernikahan sirri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian, apabila permohonan tersebut permohonan poligami maka anak itu tetap tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan perkawinan yang pertama tidak dianggap sah dihadapan hukum. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngi.

Perkawinan di Indonesia harus dicatatkan pada lembaga yang diberi kewenangan agar perkawinan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum. Bagi perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Islam, tetapi belum dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan, negara memberi ruang untuk mendapatkan pengakuan perkawinan tersebut melalui *ithbat* nikah.

Ithbat nikah dalam sejarahnya, diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, perkara *ithbat* nikah bagi pengadilan agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun fakta yang terjadi di masyarakat banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 yang syarat dan rukunnya secara Islam terpenuhi, tetapi dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan,

yaitu pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan ithbat nikahnya di Pengadilan Agama*”.

Dalam putusan Nomor : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngi, majelis hakim Nganjuk menolak permohonan *ithbat* nikah. Pertimbangan hakim dalam putusan ini, adalah pertimbangan yuridis, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan istri. Hakim memutuskan untuk tidak meng*ithbatkan* pernikahan antara pemohon dan termohon I dikarenakan tidak ada izin dari dari termohon II selaku istri pertama dari termohon I.

Menurut hemat penulis, seharusnya majelis hakim tidak hanya melihat pada aspek yuridis saja, melainkan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang terkandung dalam *maqasid al-shari'ah*. Kemaslahatan itu bisa tercapai dan terialisasikan apabila lima unsur pokok terpelihara dengan baik, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam perkara ini yang paling penting untuk diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap keturunan (*hifzu al-nashl*), yaitu anak yang di hasilkan dari pernikahan siri antara pemohon dengan termohon I, baik yang menyangkut hubungan nasab antara anak dengan ayahnya maupun kesejahteraan anak tersebut.

Berdasarkan kemaslahatan, maka mengabulkan *ithbat* nikah merupakan kebutuhan yang bersifat *daruri* (mendesak) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri, dan akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan sebagainya.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam dianalogikan dengan pencatatan dalam persoalan utang-piutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya:”*Hai*

orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".²²

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, seharusnya akad nikah yang jauh lebih penting itu dicatatkan. Pencatatan perkawinan, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat preventif, seperti upaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini guna menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundang-undangan sudah direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian pencatatan perkawinan mengandung kemanfaatan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia.

Dengan pertimbangan kemaslahatan di atas, seharusnya dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan adanya permohonan *ithbat* nikah, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kemaslahatan bagi hubungan suami istri terutama dalam masalah yang menyangkut keperdataan anaknya dan juga mengantisipasi hal-hal yang mengandung *mafsadah*.

Setiap penetapan dan putusan hakim Pengadilan Agama seharusnya mempertimbangkan aspek *maslahah*, agar semua kemaslahatan ini bisa dicapai oleh para pihak terkait serta tidak mengundang kemudharatan sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Penutup

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim, dalam menetapkan perkara *ithbat* nikah pada kasus ini adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a)

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 407.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Karena ketentuan inilah majelis hakim menolak permohonan *ithbat* nikah tersebut.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim yang hanya memperhatikan aspek yuridis tanpa mempertimbangkan tujuan diberlakukannya hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum untuk kemaslahatan. Dalam kasus ini yang sangat penting harus diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap kesejahteraan dan keperdataan anak dari hasil pernikahan tersebut yang hal ini merupakan salah satu unsur pokok dari tujuan diberlakukannya hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012..
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ke 32, 2014.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Damisyq: Dar Fikr, 1998.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulus di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.